

# AKTUAL

ISSN:2339-2894

Tema: Ilmu Sosial

Jurnal LPPM UNESA

Vol. 1, No. 1, Desember 2013



Visi dan Misi  
LPPM

LEMBAGA PENELITIAN  
DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

JURNAL  
AKTUAL

Vol. 1

No. 1

Hal. 1 - 107

Surabaya  
Desember 2013

ISSN  
2339-2894

# **AKTUAL**

## **Jurnal LPPM UNESA**

Jurnal ini terbit dua kali setahun pada bulan Desember dan Juni, berisi artikel hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

**Pelindung : Rektor Unesa**  
**Penasihat : Pembantu Rektor I**  
**Penanggung Jawab : Ketua LPPM Unesa**  
**Pemimpin Redaksi : Ketua Unit Jurnal dan Paten**  
**Redaksi : Sekretatis LPPM**  
**Sekretaris Unit Jurnal dan Paten**

**Ketua Penyunting**  
Prof. Dr. Warsono, MS. (Unesa)

**Mitra Bestari**  
Prof. Dyson (Unair)

**Penyunting Pelaksana**  
Drs. Fx. Sri Sadewo, M.Si.  
Dra. Rr. Hj. Nanik Setyowati, M.Si.  
Drs. Arinto, SH, MH.

**Pelaksana Tata Usaha**  
Ika Purnamawati  
Agus Supriyanto

---

**Alamat Penerbit/Redaksi:** Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Surabaya, Kampus Ketintang Surabaya 60231. Telp./Fax. (031) 8296260. *Email:* lemlitunesa@yahoo.com

---

**AKTUAL : Jurnal LPPM UNESA** menerima sumbangan tulisan ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah yang masuk dievaluasi oleh penyunting ahli. Penyunting dapat mengubah tulisan sesuai dengan gaya selingkung jurnal ini tanpa mengubah isinya.

---

Jurnal ini diterbitkan oleh University Press Universitas Negeri Surabaya

---

# AKTUAL

## Jurnal LPPM UNESA

### Daftar Isi

<b>Mutimmatul Faidah dan HM. Husni Abdullah</b> Model Integrasi <i>Sex Education</i> dalam Pendidikan Agama Islam di SMA	1-10
<b>Muhammad Farid</b> Membangun Ruang Publik Beragama di Maluku (Telaah Atas Gagasan Ruang Publik dan Teori Tindakan Komunikatif Jurgen Habermas)	11-28
<b>Oksiana Jatiningasih dan Maya Mustika Kartika Sari</b> Pendidikan Karakter: Pengembangan Perangkat Pembelajaran Tematik Berkarakter untuk Meningkatkan Kebermaknaan Belajar Bagi Siswa Sekolah Dasar di Surabaya	27-42
<b>Pardamean Daulay</b> Migrasi Terpaksa Masyarakat Korban Lumpur Lapindo	43-52
<b>Indriastuti, Dewi Suprobawati dan Dwi Hardaningtyas</b> Peningkatan Kualitas dan Kemampuan Pemasaran pada Dua Kelompok Pengrajin Batik di Kecamatan Benowo, Surabaya	53-58
<b>Dadang Sundawa</b> Membangun Kecerdasan Berdemokrasi Melalui Implementasi Pendekatan <i>Scientific</i> dalam Mata Pelajaran PPKn	59-66
<b>Esther Hesiine Palandi</b> Analisis Metafora Bahasa Jepang:Dimensi Sosiokultural bangsa Jepang dalam Retorika Berbahasa	67-73
<b>Sunarto Amus</b> Potret Pendidikan: Masyarakat Tradisional, Modern, dan Era Globalisasi	74-84
<b>Ratna Mestikasari Putri</b> Penciptaan Komodifikasi Dalam Karya <i>Urbanic Entertainment "My Story"</i>	85-91
<b>Joni Rusmanto</b> Fenomena Resistensi Sosial Budaya Perjuangan Subsistem Sosial dalam Menentang Dominasi dan Monopoli Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kalimantan Tengah	92-102
<b>Suyatno, Sri Hidayati Syarief, Nurul Hidayati, Tukiran, dan Rinanaingsih</b> Pelatihan Pembuatan Serbuk Jamu Instan Berbasis Bahan Alam Untuk Warga Pondok Sosial Babat Jerawat Surabaya	103-107

# MIGRASI TERPAKSA MASYARAKAT KORBAN LUMPUR LAPINDO

Pardamean Daulay\*

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perubahan pola kehidupan dan kesempatan kerja migran terpaksa korban lumpur Lapindo di daerah tujuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara responden yang dipilih secara *snowbal*. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif sesuai pandangan Miles dan Huberman (1992) yang membagi tiga alur kegiatan analisis data yaitu: reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan melalui verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden memilih daerah tujuan migrasi yang jaraknya dekat dari daerah asal, pilihan daerah migrasi berdasarkan keputusan anggota keluarga dan memanfaatkan jaringan sosial kekerabatan (66,66%), motif migrasi bukan faktor ekonomi tetapi mencari keamanan (88,10%). Mayoritas responden (88,10%) sudah menerima uang ganti rugi tanah dan lahan sawah dari PT. Lapindo, tetapi mereka kesulitan mendapatkan lahan sawah di daerah tujuan dan jika pun ada harganya cukup mahal. Kesempatan kerja di daerah tujuan ternyata tidak menyediakan banyak pilihan, karena itu para migran harus berusaha mendapatkan pekerjaan, tetapi latar belakang pendidikan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki cukup rendah sehingga menyulitkan mereka memperoleh pekerjaan. Pola penghidupan keluarga mengalami perubahan, tidak saja menggantungkan kehidupan sebagai petani, tetapi banyak diantara mereka yang beralih pekerjaan di sektor informal, seperti jual makanan kue, jajanan untuk anak-anak, tukang ojek, supir becak, dan sebagai penjual VCD di lokasi wisata danau lumpur Lapindo. Disarankan memberi bantuan modal usaha bagi migran petani korban lumpur Lapindo di daerah tujuan sehingga dapat menolong dan bahkan memberikan harapan hidup di masa depan.

**Kata Kunci:** pola kehidupan, kesempatan kerja, migran petani, lumpur lapindo

**Abstract:** This study aimed to describe the migration motive which is applied by migrant farmers of Lapindo mudflow victims and identify the migrants' lifestyle and jobs opportunities at the destination. This study uses a qualitative approach with a case study strategy. The data were collected through questionnaires and interviews from respondents through snowball selection (snowball technique). The data analysis uses appropriate qualitative data analysis methods of Miles and Huberman (1992) point of view which divides three flow activities data analysis namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions through verification. The results showed that the majority of respondents chose the destination of migration which is not far from area of origin (57.15%), the choice of the area of migration was based on the decision of family members and social networks of kinship (66.66%), and the migration motive is not economic factor but finding the safety (88.10%). The majority of respondents (88.10%) have received cash compensation of land and rice field from PT. Lapindo, but they have trouble getting rice field at the destination and if any are quite expensive. Jobs opportunities in the destination did not provide many options, so migrants should try to get a job, but the educational background, skills and expertise sufficiently low that make them difficult to obtain job. Family's lifestyle changed, in which they did not only work as a farmer, but many of those who switch jobs to the informal sector, such as selling cake, snacks for kids, motor bike taxi (Ojek) and labour. The results of this study advised to provide capital assistance for migrant farmers of Lapindo mudflow victims at the destination so that it can help and even to have a life expectancy in the future.

**Keywords:** Lifestyle, Work opportunities, Migrant farmers, Lapindo Mud

---

\* Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

## Pendahuluan

Fenomena migrasi merupakan hasil dari suatu proses yang kompleks dan dipengaruhi beragam faktor penyebab. Namun, pada prinsipnya seseorang memutuskan untuk melakukan migrasi didasari oleh adanya alternatif lain yang dapat mengubah kehidupannya. Tidaklah mengherankan jika selama ini kegiatan migrasi dianggap sebagai peristiwa kependudukan yang biasanya dilakukan melalui proses pengambilan keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan yang mendalam, termasuk pemilihan daerah tujuan. Lee, (1976) menyatakan ada 4 (empat) faktor yang mendorong keputusan seseorang untuk melakukan migrasi, yaitu: faktor yang terdapat di daerah asal (dorong), faktor yang ada di daerah tujuan (tarik), faktor penghalang, dan faktor pribadi.

Namun, fenomena migrasi penduduk yang dilakukan secara terpaksa (*forced migration*) karena alasan untuk mempertahankan diri dari bahaya bencana alam masih kurang mendapat perhatian dari berbagai peneliti kependudukan. Padahal, beberapa tahun terakhir ini fenomena migrasi terpaksa cukup banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, baik yang meninggalkan daerah dalam waktu singkat maupun dalam waktu yang lama, seperti bencana tsunami di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta gempa di Padang, banjir di Jakarta, dan bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo. Tabel 1. menunjukkan perkembangan kejadian bencana di Indonesia dan hingga akhir Desember 2006 lebih dari 900.000 orang terpaksa melakukan migrasi di berbagai tempat yang aman.

Tabel 1 Rekapitulasi Kejadian Bencan Alam di Indonesia Menurut Jenis, Jumlah dan Korban Meninggal, HilaNg dan Mengungsi

Jenis bencana	Jumlah kejadian	Meninggal (orang)	Hilang (orang)	Mengungsi (orang)
Banjir	378	639	476	417.136
Tanah longsor	73	150	165	7.587
Gempa bumi	289	5.847	6	379.171
Jumlah	840	7.303	1.140	901.355

Sumber : Noveria (2007)

Berbagai peristiwa bencana tersebut memiliki dampak terhadap perubahan sosial, baik lingkungan maupun budaya. Dampak bencana bisa berlangsung cepat, tetapi juga dapat berlangsung lambat dan hal ini tergantung pada jenis, lokasi dan jumlah korban. Terjadinya perubahan sosial secara cepat akan dilalui oleh pihak-pihak yang terlibat tanpa disadari atau mungkin pula tidak diharapkan (Sztompka, 2007). Seperti halnya, peristiwa bencana lumpur panas Lapindo di Sidoarjo yang terjadi sejak Mei 2006, memang tidak merenggut korban jiwa manusia secara

langsung, tetapi secara perlahan-lahan lumpur panas ini telah menenggelamkan rumah dan areal persawahan di sekitarnya. Akibatnya, seluruh warga tanpa ter-kecuali terpaksa pindah ke daerah lain karena tidak mungkin tinggal di tempat asalnya. Kondisi ini diperkuat dengan legalitas dalam regulasi pemerintah yang memerintahkan korban untuk menjual tanah dan bangunan mereka ke Lapindo (Perpres 14/2007 dan Perpres 48/2008).

Migrasi terpaksa petani korban lumpur Lapindo ke tempat baru membawa

perubahan yang signifikan pada proses dan struktur masyarakat. Hubungan sosio-kultural, ekonomi, kekeluargaan dan pranata sosial juga mengalami kemunduran atau ketidakteraturan, bahkan sangat berpotensi untuk terjadinya konflik sosial di tempat yang baru (Mirdasy, 2007). Perubahan sosial yang paling nyata terlihat dari pola hubungan dan stratifikasi sosial yang secara tidak langsung akan mengubah dan mempengaruhi norma-norma masyarakat, seperti mengubah cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), dan adat istiadat (*custom*) masyarakat (Soekanto, 2002).

Proses migrasi yang dilakukan korban lumpur Lapindo cukup menarik karena memiliki perbedaan dengan studi-studi migrasi sebelumnya. *Pertama*, dilihat dari faktor pendorong melakukan migrasi dilatarbelakangi oleh faktor keamanan, sedangkan studi lain menunjukkan bahwa motif seseorang melakukan migrasi berkaitan dengan faktor ekonomi, seperti harapan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dan memperbaiki taraf hidup (Mantra, 1980, Lee, 1971). *Kedua*, pilihan daerah tujuan migrasi cenderung ke daerah yang dekat dengan daerah asal, sedangkan studi sebelumnya memperlihatkan seseorang memilih tujuan migrasi ke pusat-pusat industri dan pusat perdagangan yang dapat memberikan lapangan pekerjaan (Wahyuni, 2003). *Ketiga*, terjadinya migrasi secara serentak dalam waktu yang bersamaan dan harapan untuk pulang ke daerah asal dan sudah tidak memungkinkan, sedangkan studi Tarigan (2002) menunjukkan bahwa migrasi dilakukan secara berantai mengikuti migran yang telah berhasil di daerah tujuan dan apabila sudah mencukupi baik dari segi ekonomi maupun keamanan mereka akan kembali ke daerah asal.

Sayangnya, penelitian yang mengulas tentang fenomena migrasi yang dilakukan oleh petani korban lumpur Lapindo ini belum dilakukan. Studi yang paling dekat dengan masalah ini dilakukan Daulay dan Sumarmi (2010) yang menunjukkan enam mekanisme survival yang dilakukan oleh rumah tangga

korban lumpur Lapindo di lokasi pengungsian, diantaranya menyalahi usaha melalui migrasi sebagai pilihan terakhir. Namun, penelitian tersebut belum mengungkap secara mendalam bagaimana pola kehidupan dan kesempatan kerja migran di daerah tujuan. Padahal, beberapa media massa melaporkan bahwa di daerah tujuan migran petani mengalami banyak masalah, karena disamping kehilangan tempat tinggal, mereka juga kehilangan sawah yang menjadi sumber mata pencaharian pokok selama ini. Selain itu, umumnya migran petani memiliki latar belakang pendidikan, ketrampilan dan keahlian yang tergolong rendah, sehingga mengalami masalah dalam penciptaan kesempatan kerja baru. Berbeda dengan korban lumpur Lapindo yang mempunyai pekerjaan di bidang non pertanian seperti pegawai negeri (guru, dosen, dan pegawai kantor), mereka cukup memikirkan tempat tinggal, sedangkan pekerjaan masih tetap seperti semula, bahkan, beberapa diantaranya mengalami perubahan kehidupan sosial ekonomi ke arah yang lebih baik (Jawa Pos 7 Nopember 2007).

Artikel ini akan membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2012 yang bertujuan untuk mendeskripsikan motif migrasi korban lumpur Lapindo dan perubahan pola kehidupan sosial ekonomi mereka di daerah tujuan.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara terhadap responden yang dipilih secara *snowball*. Analisis data dilakukan secara kualitatif mengikuti alur dari Miles dan Huberman (1992) yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan melalui verifikasi.

Penggalan data tentang motif migrasi, penelitian melakukan wawancara terstruktur pada 42 kepala keluarga yang diambil secara acak dari masyarakat korban lumpur Lapindo, yaitu Desa Renokenongo dan Desa Kedungbendo. Dua desa itu dipilih karena



sebelum kasus lumpur Lapindo, memiliki wilayah per-tanian paling luas. Sebagai konsekuensi ekologis tersebut, sebagian besar pen-duduknya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Sama seperti korban lain, mereka kemudian melakukan migrasi ke daerah lain.

Selain melalui wawancara secara terstruktur, untuk menggali informasi lebih dalam, mereka juga diwawancarai secara mendalam (*indepth interview*). Pertanyaan dalam wawancara tersebut menyangkut masalah proses dan pola adaptasi di tempat tujuan. Tahap selanjutnya adalah data yang dikumpulkan dengan kedua teknik tersebut dan diolah dengan statistik deskriptif. Data kualitatif dari teknik wawancara mendalam digunakan untuk memperkuat gambaran dari hasil statistik deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan

**Profil Migran Petani Korban Lumpur Lapindo.** Sebelum terjadinya semburan lumpur Lapindo Kabupaten Sidoarjo berjalan dengan kemajuan yang cukup pesat, baik dalam bidang pertanian, perikanan dan bahkan perindustrian. Kemajuan tersebut terkait erat dengan letak Sidoarjo yang berada di Delta Sungai Berantas sehingga memiliki tanah pertanian yang subur dan dikenal sebagai penghasil komoditi pertanian seperti padi, tebu, dan kacang-kacangan. Disamping itu, keberadaan selat Madura di sebelah timur menjadi potensi yang cukup besar terutama produk udang dan kepiting, sehingga kedua produk laut ini menjadi simbol kebanggaan kabupaten Sidoarjo.

Terjadinya semburan lumpur panas pada pertengahan tahun 2006, menyisahkan persoalan pelik, sehingga nama Porong mendadak terkenal tidak hanya di Indonesia tetapi juga sampai ke mancanegara, karena pemerintah dan pihak PT Lapindo menngklaim kasus tersebut sebagai bencana. Namun, Gubernur Jawa Timur pada saat itu masih dipimpin oleh Bapak Imam Utomo mengusulkan memberi nama "Lumpur Porong" karena pusat lumpur memang berada di kecamatan Porong. Disamping itu,

memang kecamatan Porong paling memikul beban luberan lumpur dibanding dua kecamatan yang lain, yaitu Jabon dan Tanggulangin. Persoalannya setelah para korban lumpur Lapindo ini terpaksa melakukan migrasi ke daerah lain, apakah kehidupan mereka semakin membaik.

Sebaran jenis kelamin responden menunjukkan dari 42 orang responden 33 orang (78,57%) laki-laki, dan sisanya 9 orang (21,43%) adalah perempuan. Sementara itu, dilihat dari status perkawinan responden dapat diketahui bahwa 40 orang (95,24%) berstatus kawin, dan 2 orang (4,76%) berstatus janda/duda. Disamping ketiga karakteristik di atas, dapat dideskripsikan juga latar belakang pendidikan responden. Dari 42 responden ternyata 26 orang (61,91%) responden memiliki latar belakang pendidikan SD, tamat SLTP sebanyak 11 orang (26,19%), dan tamat SLTA 7 orang (16,66%). Rendahnya tingkat pendidikan responden diprediksi berpengaruh terhadap kesempatan kerja di daerah tujuan. Namun, dari aspek usia, kebanyakan responden memiliki usia muda, yaitu yang memiliki usia 20 - < 30 tahun sebanyak 24 orang (57,15%), usia 30 - 40 tahun sebanyak 11 orang (26,19%), dan kategori usia > 40 tahun sebanyak 7 orang (16,66%). Jika dikaitkan dengan usia kerja, maka responden yang mewakili warga petani korban lumpur Lapindo ini berada pada usia produktif. Data ini memberikan gambaran bahwa dengan usia yang produktif sejatinya mereka tidak mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan di daerah tujuan.

**Motif Migrasi Petani Korban Lumpur Lapindo.** Ada beberapa motif yang mendasari seseorang melakukan migrasi dan umumnya faktor ekonomi di daerah tujuan menjadi faktor utama yang selalu dijadikan alasan untuk melakukan migrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan responden melakukan migrasi tidak terkait dengan faktor daya tarik di daerah tujuan, tetapi alasan utama melakukan migrasi adalah rasa aman (keselamatan), yaitu sebesar 37 orang (88,10%), dan hanya 5 orang (11,90%) yang mengharapkan peluang dan kesempatan

kerja. Temuan data ini memperlihatkan pertentangan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu yang umumnya lebih banyak menjelaskan bahwa seseorang melakukan migrasi karena alasan ekonomi. Penelitian Sudibia (1998) tentang mobilitas penduduk sirkuler di daerah asal yang menyimpulkan bahwa mereka melakukan migrasi didorong adanya motif ekonomi. Begitu juga hasil penelitian Susilo (2002) tentang migrasi TKI ke luar negeri di Kabupaten Tulungagung yang menyimpulkan bahwa tujuan TKI bermigrasi ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih besar dibandingkan di daerah asal.

Terkait dengan motif melakukan migrasi ternyata berpengaruh terhadap pemilihan daerah tujuan. Sebagian besar responden melakukan migrasi dengan ruang (*space*) dalam lintas kabupaten Sidoarjo yaitu; lain dusun satu kelurahan sebanyak 24 orang (57,15%), lain desa satu kecamatan sebanyak 16 orang (38,09%), lain kecamatan satu kabupaten sebanyak 2 orang (4,76%), dan tidak ada yang memilih di luar kabupaten Sidoarjo atau di luar provinsi.

Kecenderungan korban lumpur Lapindo bermigrasi ke daerah yang lebih dekat berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial, menyangkut ikatan batin dengan tanah leluhur dan pelestarian nilai-nilai budaya. Warga memilih menetap di tempat yang sekarang karena jaraknya tidak terlalu jauh dengan daerah asal sehingga untuk mengenang tradisi dan kuburan nenek moyang mereka masih dapat dilakukan sewaktu-waktu. Inilah yang disebut Mantra (1985) sebagai faktor kekuatan sentripetal, yakni suatu kekuatan yang mengikat seseorang untuk memilih tinggal mendekati daerah asal agar bisa selalu mengenang kehidupan yang pernah dijalani dan juga mengenang makam leluhur. Sementara itu, aspek ekonomi terkait dengan uang ganti rugi yang belum tuntas atau belum diterima oleh responden. Jarak daerah tujuan yang berkisar 10 - 30 km dari semburan lumpur Lapindo membuat mereka dapat berkunjung sewaktu-waktu, terutama jika ada kegiatan yang

berhubungan dengan persoalan kelanjutan ganti rugi yang belum lunas.

Proses pengambilan keputusan pemilihan daerah tujuan migrasi dilakukan secara bersama di dalam suatu kelompok. Hal ini terlihat dari temuan data tidak satu pun responden yang menjawab pengambilan keputusan secara pribadi, tetapi sebagian besar 28 orang (66,66%) menyatakan keputusan diambil secara bersama. Pengambilan keputusan daerah tujuan migrasi bagi penduduk dilakukan dengan menggunakan jejaring sosial dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh anggota kelompok masyarakat yang ada di daerah asal. Proses perpindahan dilakukan secara kolektif dengan membeli sepetak lahan dan biaya diperoleh dari uang penjualan tanah dan bangunan mereka.

Proses perpindahan yang dilakukan oleh kelompok yang tergabung dalam Pagar Rekorlap ini dikenal "Bedol Desa". Ketentuan ini dirumuskan sesuai keinginan masyarakat setempat agar lokasi baru tidak dimasuki oleh penduduk pendatang. Dengan demikian, sanak keluarga dan kerabat mereka yang dulunya tinggal di desa Renokenongo dapat berkumpul kembali, sehingga kehidupan sosial budaya masyarakat dapat diteruskan. Ini juga membuktikan jika mentalitas petani masih tetap dilestarikan oleh petani korban lumpur Lapindo di daerah tujuan dengan adanya perasaan aman dan tentram sepanjang kebutuhan hidupnya terfenuhi (*susbsisten*) dan tradisi-tradisi leluhur tetap dilestarikan.

**Perubahan Pola Kehidupan Sosial Ekonomi.** Untuk melihat pola ke-hidup-an ekonomi migran petani korban lumpur Lapindo dilakukan dengan mengacu pendapat dari Soeratmo (dalam Dahriani, 1995) yang mengemukakan kehidupan sosial ekonomi diukur berdasarkan; pendapatan, keadaan tempat tinggal, dan pendidikan anak. Sedangkan kehidupan sosial diamati dari intensitas konflik sosial dan kegiatan budaya di daerah tujuan.

Rumah atau tempat tinggal adalah tempat berlindung dari pengaruh cuaca di luar maupun sebagai tempat berkumpulnya



manusia atau keluarga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Untuk itulah, tidak mengherankan uang ganti rugi yang diterima responden dari PT. Lapindo digunakan untuk membeli rumah. Temuan data menunjukkan bahwa dari 42 orang responden, hanya 2 orang (4,76%) yang menyisahkan untuk keperluan membeli sawah, sedangkan keperluan membeli rumah sebanyak 40 orang (95,24%) sehingga status kepemilikan tempat tinggal responden di daerah tujuan 100% milik sendiri. Bentuk dan kondisi rumah tempat tinggal mengalami perubahan seiring dengan uang ganti rugi yang dipeoleh. Pada saat ini bangunan rumah, terlihat sederhana tetapi sudah bervariasi dalam model dan bentuknya. Dinding rumah selain menggunakan papan, juga sudah banyak menggunakan bahan campuran semen dan pasir serta besar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk rumah permanen sebanyak 35 orang (83,33%), dan setengah batu sebanyak 5 orang (11,91%), dan hanya 2 orang (4,76%) yang masih memiliki rumah dari kayu (tepas). Luas setiap rumah berbeda-beda, tergantung pada kemampuan setiap keluarga atau rumah tangga. Lebar

rumah mereka ini rata-rata 4 - 6 meter, sedangkan panjangnya rata-rata 6 - 8 meter dengan bentuk persegi empat panjang.

Perubahan pola kehidupan dapat dilihat juga dari kepemilikan harta kekayaan, walaupun sebagian besar responden sudah memiliki radio dan televisi, dan sepeda motor yang dibeli kontan dari hasil uang ganti rugi yang diterima dari PT. Lapindo. Ada perubahan yang terjadi pada diri korban lumpur Lapindo yang mengarah kepada materialisme. Hal ini terlihat dari banyaknya petani yang menggunakan ganti rugi tanah selain untuk kebutuhan rumah tetapi juga untuk membeli sepeda motor. Hanya sebagian responden yang menggunakan uang ganti rugi untuk membeli lahan persawahan di daerah tujuan atau ditempat lain, karena lahan pertanian di sekitar daerah tujuan sulit dicari, jika pun ada sangat mahal dan lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka. Temuan data ini sekaligus mendeskripsikan bahwa para migran petani korban lumpur Lapindo tidak memiliki pekerjaan utama sebagai petani lagi, tetapi beralih pekerjaan ke sektor informal. Selengkapnya jenis pekerjaan responden saat ini di daerah tujuan dapat dilihat pada tabel 1 di halaman berikut.

Tabel 1  
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan di Daerah Tujuan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	%
1	Petani	2	4,65
2	Buruh tani	5	11,90
3	Pedagang	8	19,04
4	Tukang Becak	4	9,52
5	Tukang Ojek	7	16,66
6	Buruh/karyawan	13	30,95
7	Ibu rumah tangga	3	7,14
Jumlah		42	100

Sumber: Data penelitian 2012

Selama hidup di daerah tujuan sebagian besar ekonomi keluarga responden memburuk, sementara biaya hidup semakin hari semakin banyak. Jika hanya mengandalkan pendapatan suami sebagai kepala keluarga, maka kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Ukuran pendapatan di daerah tujuan penting diketahui untuk mendeskripsikan apakah pendapatan responden mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan dengan kehidupan mereka sebelum adanya lumpur Lapindo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan keluarga responden di daerah tujuan berkisar antara Rp. 500.000 – Rp. 1000.000, yaitu sebanyak 32 orang (76,19%), yang berpenghasilan Rp. 1000.000 – Rp. 2000.000 sebanyak 7 orang (16,67%), dan berpenghasilan < Rp. 500.000 sebanyak 3 orang (7,14%). Dengan penghasilan seperti ini menurut responden mereka hanya bisa hidup seadanya, apalagi jika dikaitkan dengan jumlah tanggungan keluarga. Padahal, sebagian besar responden memiliki tanggungan keluarga antara 4- 6 jiwa yaitu sebanyak 28 orang (66,67%), dan 14 orang (33,33%) memiliki tanggungan antara 1 – 3 orang.

Besar kecilnya jumlah anak yang menjadi tanggungan bagi kepala keluarga terutama dalam memenuhi segala kebutuhan sang anak. Kebutuhan bagi anak selain sandang pangan juga kebutuhan untuk bersekolah adalah hal yang paling pokok bagi bekal masa depan anak. Namun, pendapatan keluarga seperti yang dialami saat ini, tidak mampu membiayai pendidikan sehingga anak-anak responden sebagian harus berhenti dan tidak bisa melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Gejala anak putus sekolah terjadi pada peserta anak didik tingkat SMP yang tidak melanjutkan kejenjang pendidikan SLTA, namun juga ada yang hanya bersekolah sampai tingkat SD saja. Anak-anak putus sekolah ini memiliki keinginan untuk bekerja di pabrik, tetapi karena mereka tidak memiliki ijazah dan keahlian sehingga pihak perusahaan tidak menerima. Padahal sebenarnya, kalau

diberikan pelatihan dan diperbolehkan mengerjakan di rumah sendiri sangat dimungkinkan mereka dapat membantu pendapatan keluarga dan sekaligus membiayai kebutuhan sekolah.

Untuk mengatasi kebutuhan pokok keluarga yang tidak bisa ditunda, para migran petani perempuan mulai ikut bekerja membantu suami. Sutinah (43 tahun), setiap pagi berjualan lontong hingga siang hari dan setelah pulang juga membantu suaminya menjaga warung kecil-kecilan. Warung yang dibukanya menjual berbagai macam barang keperluan sehari-hari, seperti rokok, sabun mandi, makanan anak-anak. Pendapatan yang diperoleh dari berjualan lontong dan buka warung, menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan keluarganya saat ini. Sebenarnya Sutinah memiliki keinginan untuk membuka kembali usaha wira-swasta yang telah dikembangkannya sebelum munculnya kasus lumpur Lapindo, tetapi keinginan tersebut tidak dapat diwujudkan karena mereka tidak memiliki modal. Untuk mendapatkan modal usaha, mereka pernah mengajukan pinjaman modal usaha kepada bank dengan memberikan jaminan surat tanah dan bangunan rumah, tetapi pihak bank menolaknya karena surat tanah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai jaminan.

Meskipun migran korban lumpur Lapindo ini menghadapi kehidupan ekonomi yang serba sulit, ternyata mereka masih memiliki harapan untuk mengubah kehidupan mereka seperti semula dengan membangun usaha yang pernah mereka jalankan sebelumnya. Kehidupan ketetangaan dan kekeluargaan yang telah terbangun dan menjadi kebiasaan berperilaku masyarakat yang ada di sekitar semburan lumpur tidak mengalami perubahan yang sangat mendasar. Disamping itu, mereka juga berintegrasi dan berinteraksi dengan para penduduk di daerah setempat dan juga dengan sanak keluarga, tetangga yang dulu sudah saling kenal di daerah asal dan terutama bagi pengurus kelompok. Kunjungan pada tempat sanak keluarga menunjukkan ada 39 responden (92,86%) saling berkunjung ke

tempat sanak keluarga, sedangkan 3 orang (7,14%) responden yang menyatakan tidak pernah berkunjung pada sanak keluarga yang sama-sama menjadi korban lumpur Lapindo. Sementara itu, responden yang sering melakukan kunjungan ke pengurus kelompok karena urusan masalah ganti rugi yang belum selesai.

Terkait dengan ganti rugi dari PT. Lapindo sebagai penanggulangan Kerenggangan dan ketegangan serta kecurigaan masyarakat yang sebenarnya jarang terjadi ataupun tidak pernah terjadi selama ini, nampaknya menjadi realitas baru dalam masyarakat korban lumpur Lapindo. Kecenderungan ini lebih disebabkan oleh kebijakan yang sesat dalam penyelesaian ganti rugi tanah yang ditawarkan pemerintah. Untuk mengganti rugi tanah dan bangunan korban Lumpur Lapindo dilakukan melalui tiga jenis, *cash and carry*, pembayaran 80 %, dan secara bertahap. Perbedaan penyelesaian ganti rugi ini kemudian menyebabkan masyarakat korban lumpur dalam polarisasi yang sangat tajam, sehingga diantara mereka muncul beberapa kelompok dan diantaranya selalu mencurigai satu sama lain. Kecurigaan diperkuat lagi dengan kecemburuan terhadap satu kelompok yang kebetulan sudah memperoleh ganti rugi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas terjadinya konflik antar sesama petani korban lumpur Lapindo di daerah tujuan, yaitu sebanyak 27 orang responden (64,28%) menyatakan sering terjadi, 10 orang (23,81%) menyatakan jarang terjadi konflik, dan hanya 5 orang responden (11,91%) yang menyatakan tidak pernah terjadi konflik. Temuan data ini didukung oleh pemberitaan di media massa yang melaporkan bahwa petani dan warga korban lumpur Lapindo di daerah tujuan masih rawan konflik, baik antara sesama korban lumpur Lapindo maupun dengan pihak pemerintah. Terjadinya konflik sesama petani korban lumpur Lapindo menyusul menguatnya polarisasi diantara mereka yang menuntut ganti rugi secara tunai dengan mereka yang menerima tawaran rumah yang disediakan PT. Lapindo Jaya di

Sukodono Sidoarjo. Warga korban lumpur Lapindo yang menerima tawaran rumah langsung diberi ganti rugi kekurangan 80% dibayar tunai, sedangkan mereka yang meminta ganti rugi uang tunai masih diberi janji sehingga mereka sangat marah (Kompas, Januari 2008).

Namun, pihak PT. Lapindo sampai saat ini belum merealisasikan ganti rugi karena surat keterangan tanah yang dimiliki korban tidak diakui. Akibatnya, sebagian besar mereka pun berusaha menemui dan meminta dukungan gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk kemudahan mendapatkan sertifikat tanah dari kantor BPN Jawa Timur. Popkin (1986) memberikan pandangan bahwa meskipun kehidupan ekonomi petani selalu berada di sekitar garis subsistensi, namun petani sebagai makhluk yang memiliki rasionalitas akan terus berusaha memaksimalkan sumber daya dan kemakmuran sendiri tanpa memperdulikan moral pedesaan. Tindakan sosial yang dilakukan petani tidak semata karena alasan moral dan solidaritas, tapi juga dengan pertimbangan manfaat yang bisa diperolehnya dari tindakan tersebut.

Apa yang dijelaskan Popkin (1986) terwujud dalam kasus petani yang terkena semburan lumpur Lapindo, dimana mereka berani menolak semua kebijakan dari PT Lapindo maupun pemerintah, selama kebijakan tersebut merugikan mereka. Petani ingin perubahan sosial ekonomi yang lebih baik dibanding sewaktu hidup di daerah asal. Petani sudah dirugikan secara non finansial, seperti mereka berpisah bercerai berai dengan tetangga di daerah asal, mereka para petani harus kehilangan mata pencaharian dan lahan sawahnya, mereka dan keluarganya kehilangan lokasi makam bagi leluhur keluarganya yang telah meninggal. Keberanian penolakan petani korban Lapindo ini sebenarnya juga telah dilakukan oleh petani yang terdahulu seperti penolakan atau pembelotan petani dalam modernisasi pertanian.

## Simpulan dan Saran

Motif migrasi yang dilakukan petani korban lumpur Lapindo bukan faktor ekonomi tetapi keinginan untuk menyelamatkan diri sehingga pemilihan daerah tujuan migrasi tidak dilakukan ke daerah perkotaan, namun cenderung daerah yang lebih dekat dengan lokasi semburan lumpur, karena disamping dapat mempermudah penyelesaian proses ganti rugi tanah dan bangunan yang belum tuntas, juga adanya keinginan untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan ikatan batin dengan tanah leluhur. Secara umum pola kehidupan sosial ekonomi keluarga petani korban lumpur Lapindo di daerah tujuan mengalami perubahan, baik aspek pendapatan, pendidikan, dan perumahan. Diantara ketiga aspek tersebut, hanya aspek perumahan yang menunjukkan terjadinya perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan pendapatan dan pendidikan cenderung mengalami penurunan. Aktivitas sosial budaya tidak mengalami perubahan, tetapi ada kecenderungan munculnya konflik diantara sesama migran akibat pilihan penyelesaian ganti rugi tanah yang berbeda sehingga membentuk polarisasi dalam masyarakat dan akhirnya berujung pada saling curiga dan menghasilkan konflik sosial. Kesempatan kerja di daerah tujuan ternyata tidak menyediakan banyak pilihan, karena itu mereka harus berusaha mendapatkan pekerjaan, tetapi latar belakang pendidikan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki cukup rendah menyulitkan untuk memperoleh pekerjaan sehingga mereka tidak menggantungkan kehidupan sebagai petani, tetapi banyak diantara mereka yang beralih pekerjaan di sektor informal, seperti jual makanan kue, jajanan untuk anak-anak, tukang ojeg, supir becak, dan buruh/karyawan.

Berdasarkan gambaran pola kehidupan migran petani di daerah tujuan, menunjukkan bahwa kehidupan mereka sebenarnya tidaklah nyaman bahkan masih cukup memprihatinkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut pemerintah perlu memberikan

bantuan modal usaha bagi korban lumpur Lapindo dengan cara memberikan bantuan yang tepat sasaran dan produktif, sehingga dapat bermanfaat untuk pengembangan usaha yang sesuai kondisi di daerah tujuan. Selain itu, perlu merealisasikan keinginan migran petani korban lumpur Lapindo untuk memberikan pelatihan keterampilan kerja (*Life Skill*) kepada anak-anak yang putus sekolah di daerah tujuan yang diperkirakan jumlahnya cukup banyak.

## Daftar Acuan

- Akbar, Ali, Azhar. 2007. *Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo: Dari Aktor Hingga Strategi Kotor*, Yogyakarta : Galang Press,
- Daulay, Pardamean dan Mamik Sumarmi, 2010. Mekanisme Survival Rumah Tangga Korban Lumpur Lapindo, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol 2 September 2010, Jakarta, Universitas Terbuka.
- Dahriani. 1995. *Potret Kehidupan Pedagang Kaki Lima di Pantai Losari*, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Giddens, A. 1995. *The Constitution of Society: Outline of The Theory of Structuration*, Cambridge : Polity Press,
- Ilah, Saiful. 2006. Perkembangan Dampak Luapan Lumpur di Kecamatan Porong dan Sekitarnya, dalam *Diskusi Panel Ikatan Alumni Ekonomi Unair*, Surabaya.
- Kanto, Sanggar, 2006, *Mobilitas Penduduk dan Perubahan Sosial: Kasus migrasi sirkuler pada Daerah Bencana*. Malang: Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
- Lee, Everett, S. 1976. *Suatu Teori Migrasi*. Seri Terjemahan No 3. Pusat Penelitian Studi Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Mantra , IB, 2000. *Studi Migrasi Penduduk Pada Daerah Bencana*, Makalah disampaikan pada Dies Natalis Fakultas Geografi UGM, Agustus,2000.

- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992.. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan dari *Analyzing Qualitative Data : A Source Book for New Methods*. Jakarta : UI Press,
- Noveria, Mita. 2007. *Bencana Alam Dari Sisi Kependudukan Penyebab dan Dampaknya*, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, edisi XXXIII, No. 2, 2007.
- Popkhin, Samuel, L, 1986, *Petani Rasional*, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta.
- Susilo, Singgih. 2002. *Remitensi dan Kesejahteraan Keluarga (Hubungan Antara Besarnya Remitensi dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Daerah Asal, Suatu Kasus TKI di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)*. Tesis Pasacasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta : Prenada.